

EFEKTIVITAS DAN DAMPAK BANTUAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENERIMA KUBE DI KABUPATEN BADUNG

Ni Luh Eva Yuliantari¹
Luh Putu Aswitari²

^{1,2}Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: evayuliantari94@gmail.com / Telp: +6281246963269

ABSTRAK

Kesejahteraan merupakan tingkat kelayakan hidup masyarakat yang dilihat dari sisi ekonomi dan sosial. Banyak program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan terutama kesejahteraan masyarakat miskin, salah satunya adalah bantuan sosial yang berbentuk pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan dampak bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat penerima KUBE di Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari wawancara dan observasi serta data sekunder yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung dan Provinsi Bali serta data dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Penelitian ini dilakukan di tiga kecamatan di Kabupaten Badung yaitu Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Mengwi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk komparatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan uji beda dengan metode wilcoxon. Hasil dari penelitian ini sebagai berikut: 1) efektivitas bantuan sosial bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung adalah cukup efektif, 2) bantuan sosial tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung.

Kata Kunci: Kesejahteraan, kemiskinan, bantuan sosial, KUBE, efektivitas

ABSTRACT

Welfare is a feasibility level of community life that is viewed from the economic and social side. Many government programs aimed at improving welfare, especially the welfare of the poor, one of which is social assistance in the form of empowerment of Joint Business Group (KUBE). The purpose of this study is to analyze the effectiveness and impact of social assistance on the welfare of the recipient community of KUBE in Badung regency. This study uses primary data obtained from interviews and observations and secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) of Badung and Bali Province as well as data from the Social Service and Labor of Badung Regency. This research was conducted in three sub-districts in Badung regency namely Petang Subdistrict, Abiansemal Subdistrict and Mengwi Sub-District. This study uses a quantitative approach in the form of a comparative. Data analysis technique in this research is using different test with wilcoxon method. The results of this study are as follows: 1) the effectiveness of social assistance for the welfare of the people in Badung Regency is quite effective, 2) social assistance has no significant impact on the welfare of society in Badung regency.

Keywords: Welfare, poverty, social assistance, KUBE, effectiveness

PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan hal yang ingin dicapai semua orang, walaupun untuk mencapainya seseorang harus bekerja keras. Pemerintah baik pusat maupun daerah pasti memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya seperti yang tertera dalam UUD 1945. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu cara yang diupayakan oleh pemerintah (Putra dan Sri Budhi, 2015). Pembangunan itu sendiri memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Kesejahteraan diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatannya (Artana Yasa dan Arka, 2015). Kesejahteraannya juga dapat dilihat dari pendapatan yang meningkat sehingga konsumsi juga meningkat (Suartha, 2012).

Pembangunan itu bersifat dinamis dan multidimensional, pembangunan dilakukan untuk mencapai sasaran utama yaitu kesejahteraan masyarakat di suatu negara atau daerah. Menurut Indiradewi dan Marhaeni (2016) salah satu cara meningkatkan pendapatan masyarakat agar dapat merasakan kehidupan yang layak adalah melalui pembangunan ekonomi yang merata di setiap wilayah. Pembangunan bisa berupa pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung semua sektor yang ada dan pengentasan masalah kemiskinan guna meningkatkan pendapatan penduduk miskin. Persoalan utama yang dapat menghambat pembangunan salah satunya yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang bersifat negatif dan berdampak buruk bagi kemajuan suatu daerah, jadi masalah kemiskinan ini harus dapat diberantas sampai ke akar-akarnya (Wirawan, 2015). Masih adanya

penduduk miskin di beberapa wilayah artinya strategi pemerintah untuk menaikkan taraf hidup masyarakatnya belum benar-benar efektif dilaksanakan (Kemenuh dan Wenagama, 2017).

Pada umumnya di dalam rumah tangga miskin penghasilan per hari sangat diprioritaskan karena konsumsinya hari ini sangat bergantung pada penghasilannya hari ini juga. Rumah tangga miskin dalam mempertahankan kehidupannya selalu memikirkan sisi pengeluaran dan sisi pendapatannya, dimana rumah tangga miskin selalu berupaya meminimalkan pengeluarannya dan memaksimalkan pendapatannya. Upaya itu dilakukan semata - mata untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak bagi rumah tangga miskin sangat sulit dicapai hanya dengan upaya – upaya seperti itu (Haryanto, 2008).

Pendapatan yang sedikit yang hanya bisa digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari – hari, membuat orang – orang yang berada dibawah kemiskinan harus bekerja keras setiap harinya. Pemerintah memegang peranan yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan rumah tangga miskin agar bisa hidup lebih layak (Haryanto, 2008). Kemiskinan memang merupakan masalah yang kompleks yang bisa menyerang daerah manapun, tidak terkecuali pulau Bali. Bali daerah yang dikenal dengan daerah tujuan wisata dunia dan sering disebut pulau seribu pura atau pulau dewata yang menjadi, banyak yang mengira masyarakat di Bali pasti jauh dari kata kemiskinan. Kenyataannya Bali juga tidak lepas dari masalah kemiskinan.

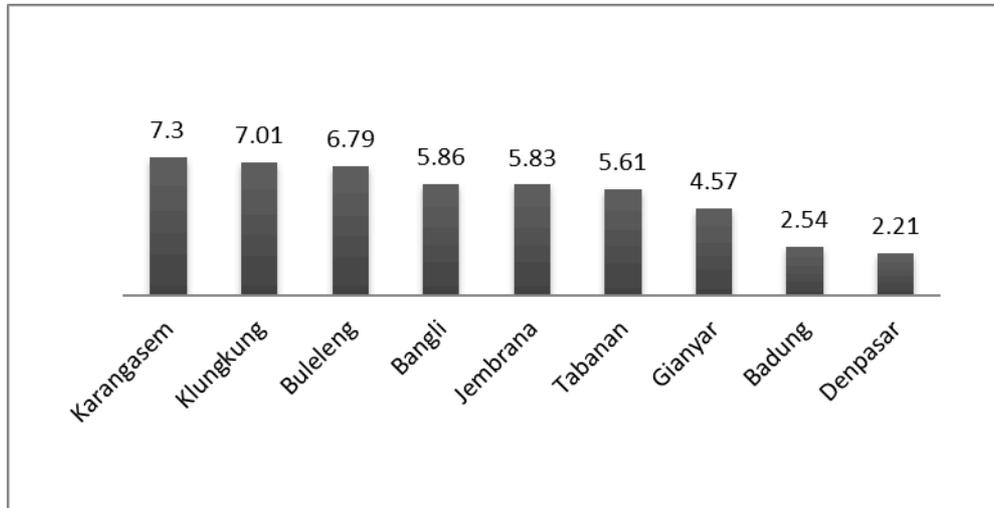
Tabel 1 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Per Provinsi Periode September 2014

No	Provinsi	Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)
1	Aceh	16,98
2	Sumatera Utara	9,85
3	Sumatera Barat	6,89
4	Riau	7,99
5	Jambi	8,39
6	Sumatera Selatan	13,62
7	Bengkulu	17,09
8	Lampung	14,21
9	Kep. Bangka Belitung	4,97
10	Kep. Riau	6,4
11	DKI Jakarta	4,09
12	Jawa Barat	9,18
13	Jawa Tengah	13,58
14	DI Yogyakarta	14,55
15	Jawa Timur	12,28
16	Banten	5,51
17	Bali	4,76
18	Nusa Tenggara Barat	17,05
19	Nusa Tenggara Timur	19,6
20	Kalimantan Barat	8,07
21	Kalimantan Tengah	6,07
22	Kalimantan Selatan	4,81
23	Kalimantan Timur	6,31
24	Kalimantan Utara	-
25	Sulawesi Utara	8,26
26	Sulawesi Tengah	13,61
27	Sulawesi Selatan	9,54
28	Sulawesi Tenggara	12,77
29	Gorontalo	17,41
30	Sulawesi Barat	12,05
31	Maluku	18,44
32	Maluku Utara	7,41
33	Papua barat	26,26
34	Papua	27,8
	Indonesia	10,96

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2014

Kemiskinan di Bali memang tidak terlalu parah dari daerah – daerah lain di Indonesia seperti Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur dan provinsi-provinsi

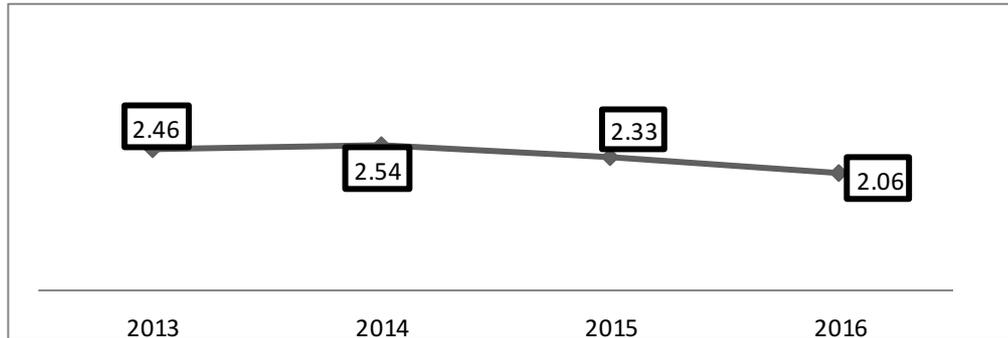
Lainnya kecuali DKI Jakarta. Kemiskinan ini juga perlu di hilangkan agar tidak mengganggu perkembangan pembangunan di Bali.



Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung dalam Publikasi Data Makro Bulan April 2016

Gambar 1 Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Menurut Kab/Kota Tahun 2014 (Persen)

Data pada Gambar 1 menunjukkan bahwa Bali yang memiliki sembilan kabupaten/kota kenyataannya juga memiliki masalah kemiskinan, walaupun masih dibawah 8 persen. Kenyataannya daerah yang sering menjadi tujuan wisata turis-turis asing ataupun domestik, cenderung memiliki pendapatan yang tinggi tetapi ternyata tidak menutup kemungkinan masih terdapat masalah kemiskinan. Badung merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam kawasan Bali Selatan yang banyak memiliki objek wisata yang sering dikunjungi oleh para turis, seperti halnya pantai kuta. Terkenal dengan julukan kabupaten terkaya di Provinsi Bali dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi dari kabupaten – kabupaten lainnya.



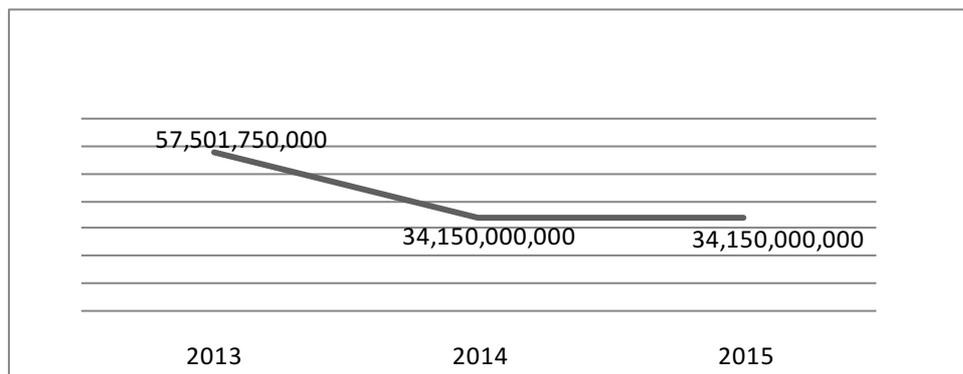
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2017

Gambar 2 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung, 2013-2016 (persen)

Badung ternyata tidak terbebas dari masalah kemiskinan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung pada Gambar 1 menunjukkan persentase tingkat kemiskinan di Badung mencapai 2,54 persen yang berada pada urutan kedelapan setelah Kabupaten Gianyar. Dilihat dari Gambar 2 jumlah penduduk miskin di Badung dari tahun 2013 - 2016 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin sempat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti pada tahun 2014 upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan sempat mengalami permasalahan. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu pertama, ditujukan untuk orang – orang yang memang miskin seperti : bantuan beras untuk orang miskin, bantuan langsung tunai, jaminan kesehatan dan PNPM mandiri. Kedua, ditujukan kepada seluruh masyarakat misalnya, pengurangan biaya sekolah (BOS) dan pendanaan pelayanan kesehatan (Sutikno dkk., 2010). Ada tiga strategi utama yang harus dilakukan dalam menanggulangi masalah

kemiskinan yaitu bantuan sosial seperti memberikan akses bagi rumah tangga miskin untuk mendapatkan pelayanan baik itu pendidikan, kesehatan, air bersih dan kebutuhan gizi, melakukan pemberdayaan kepada masyarakat miskin agar mampu meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik lagi dan yang terakhir adalah memberikan bantuan berupa kredit bagi usaha ekonomi mikro dan kecil (Putra dan Sri Budhi, 2015). Banyaknya strategi yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan namun strategi itu belum mampu menekan angka kemiskinan (Dariwardani, 2014).

Peran pemerintah daerah maupun pusat memang sangat diperlukan dalam mengentaskan masalah kemiskinan di daerah. Pemerintah kabupaten Badung sudah mengalokasikan dana APBD daerahnya untuk kepentingan bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial ini awalnya diatur dalam Peraturan Bupati Badung No.54 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten Badung tetapi peraturan itu sudah mengalami perubahan. Sekarang pemberian bantuan sosial ini diatur dalam Peraturan Bupati Badung No.64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial.



Sumber : *Apbd.badungkab.go.id*

Gambar 3 Dana APBD Yang Dialokasikan Untuk Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten Badung (Miliar)

Pada Gambar 3 terlihat tren dana APBD yang dialokasikan untuk belanja bantuan sosial mengalami fluktuasi yang cenderung menurun dari tahun 2013 – 2014 dan tetap pada tahun 2015. Bantuan sosial di Kabupaten Badung dapat berupa bantuan pemberdayaan KUBE. Masih adanya penduduk miskin di Kabupaten Badung yang memerlukan bantuan terlihat dari data Dinas Sosial Kabupaten Badung mengenai pemberian bantuan KUBE.

Tabel 2 Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM) di Kabupaten Badung

Kecamatan	Jumlah KUBE FM						Total Anggota Kube
	2013 - 2014	Jml. Anggota KUBE 2013-2014	2015	Jml. Anggota KUBE 2015	2016	Jml. Anggota KUBE 2016	
Petang	9	90	0	0	2	20	110
Abiansemal	8	80	0	0	1	10	90
Mengwi	4	40	5	50	0	0	90
Kuta Utara	0	0	0	0	0	0	0
Kuta	0	0	0	0	0	0	0
Kuta Selatan	0	0	0	0	0	0	0
Total	21	210	5	50	3	30	290

Sumber: *Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung*

Apabila data pada Gambar 3 dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin di kabupaten Badung tahun 2013 – 2014 yang trennya mengalami kenaikan dan data kelompok usaha bersama fakir miskin di Kabupaten Badung yang menunjukkan masih adanya penduduk miskin di Kabupaten Badung. Seharusnya walaupun dana APBD untuk belanja bantuan sosial mengalami penurunan tetapi jumlah penduduk miskin seharusnya sedikit lebih menurun dari tahun sebelumnya. Kenyataannya dengan penurunan jumlah dana alokasi untuk belanja bantuan sosial diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Badung yang juga terlihat dari banyaknya kelompok usaha bersama fakir miskin yang memerlukan bantuan. Padahal pemberian bantuan sosial seharusnya dapat menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan diharapkan mampu mengatasi permasalahan - permasalahan yang dihadapi masyarakat selama ini (Wirawan, 2015). Dari paparan latar belakang diatas, maka dari itu penulis ingin mengetahui efektivitas dan dampak dari pemberian bantuan sosial. Penulis akan merangkumnya dalam sebuah tulisan yang akan diberi judul: “Efektivitas dan Dampak Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Penerima KUBE Di Kabupaten Badung”.

Kesejahteraan masyarakat

Pengertian kesejahteraan masyarakat adalah suatu tingkat kelayakan hidup masyarakat yang dilihat dari kondisi sosial dan kondisi ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Menurut Todaro (dalam Khuzaironi, 2015) Indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan ukuran kesejahteraan yang seringkali digunakan. IPM merupakan

Indeks yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu negara (Hariwan dan Swaningrum, 2015). Kelemahan IPM yaitu tidak memperhitungkan keberlanjutan seperti halnya kekurangan spesifikasi komponen lingkungan (Maccari, 2014).

Menurut Badan Pusat Statistik ada tiga dimensi dasar pendekatan IPM yaitu kesehatan, pengetahuan serta hidup layak. Ketiga dimensi itu mencakup hal-hal yang mendasar dari kesejahteraan (Ranis et al., 2006). Menurut Todaro (dalam Khuzaironi, 2015) fungsi dari kesejahteraan (*welfare*) dapat dinyatakan dengan persamaan berikut ini :

$$W = w(Y, I, P)$$

Keterangan :

W = kesejahteraan

Y = pendapatan per kapita

I = ketimpangan

P = kemiskinan absolute

Tabel 3 Kategori Indeks Pembangunan Manusia(IPM)

Kategori	Capaian IPM
Sangat tinggi	$IPM \geq 80$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Rendah	$IPM < 60$

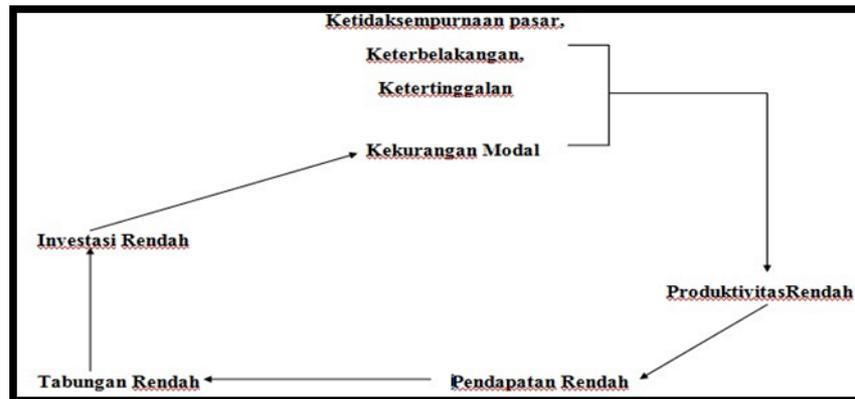
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Kemiskinan

Menurut Mubyarto (dalam Putra dan Sri Budhi, 2015) Kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan yang disebabkan oleh terbatasnya kepemilikan modal, pengetahuan dan ketrampilan yang rendah, produktivitas yang rendah, pendapatan rendah, dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Menurut Peter (dalam Tomlinson et al., 2008) dan Rothwell dan Jennifer (2008) yang memiliki pendapat yang sama yaitu kemiskinan bukanlah suatu keadaan dimana

terjadi kekurangan pendapatan untuk membeli sekeranjang barang melaikan kemiskinan merupakan keadaan kekurangan sumber daya. Di Eropa istilah kemiskinan lebih menggambarkan tentang kerugian ekonomi yang dihadapi individu (Gustafsson *et al.*, 2007).

Yuki Sekine (2008) kemiskinan tidak hanya masalah pendapatan tetapi juga mengenai kekurangan kapasitas pelayanan sosial dan kebebasan individu dalam mewujudkan dirinya menjadi lebih baik. Shaughnessy (2014) menyatakan bahwa anak-anak dari masyarakat miskin memiliki masalah pada perkembangannya, kesehatan mental dan memiliki pendidikan yang lebih rendah dari anak-anak lainnya. Menurut Kim *et al.* (2018) kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan ekonomi yang dikaitkan dengan adanya perbedaan dalam pendidikan, kesehatan dan kebahagiaan. Menurut Yusuf dan Sumner (2015) faktor utama yang meningkatkan kemiskinan seperti halnya di Indonesia adalah adanya kenaikan harga bahan bakar dan kenaikan harga bahan makanan pokok seperti beras.



Sumber : Kadji, 2013

Gambar 4 Lingkaran Setan Kemiskinan

Faktor penyebab kemiskinan yang lain menurut Nazara (dalam Nurwati, 2008) yaitu :

1) Pendidikan

Ketidakmampuan menempuh pendidikan formal sering dikaitkan dengan kemiskinan. Pemerintah mungkin sudah memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tetapi masyarakat miskin juga masih memikirkan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan seperti halnya seragam sekolah dan uang saku. Ketidakmampuan menempuh pendidikan inilah yang menyebabkan tingkat pendidikan rendah dan mengakibatkan bertambahnya kemiskinan.

2) Jenis Pekerjaan

Sama halnya dengan pendidikan, jenis pekerjaan juga sering dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Sektor pekerjaan di bidang pertanian yang paling sering dikatakan sebagai penyebab kemiskinan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian dari Sri Budhi (2013) yaitu kontribusi sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil yang sama juga diperoleh

dalam penelitian Purnami dan Saskara (2016) yaitu kontribusi sektor pertanian berpengaruh langsung positif terhadap jumlah penduduk miskin.

3) Gender

Gender juga dapat menyebabkan kemiskinan terutama kemiskinan pada perempuan. Biasanya perempuan mendapatkan diskriminasi pekerjaan. Itu dikarenakan perempuan dianggap lemah dan tidak mampu mengerjakan pekerjaan yang berat seperti yang dilakukan kaum laki-laki.

4) Letak geografis

Letak geografis dikatakan dapat menyebabkan kemiskinan. Salah satu yang menghambat pengentasan kemiskinan adalah kualitas pendidikan yang buruk (Suryadarma dan Sumarto, 2011). Menurut Suhartini dan Yuta (2014) masalah utama dalam pembangunan adalah pengentasan kemiskinan. 2011). Kebijakan atau upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sangatlah penting (Mendes, 2009). Kepedulian pemerintah sangat memberi dampak bagi peningkatan kemiskinan (Ashcroft dan David, 2008). Jadi menurut Ceu Thang dan Baharuddin (2011) pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberantas kemiskinan. Upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah di Indonesia yang bersifat langsung dalam bentuk program-program seperti bantuan raskin, bantuan langsung tunai (BLT), dana BOS, Jamkesmas, program perlindungan sosial, bedah rumah, Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Di Malaysia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya terutama masyarakat miskin yaitu dengan menyediakan rumah yang memadai dan berkualitas yang

harganya dapat dijangkau semua tingkat pendapatan (Bakhtyar et al., 2013). Selain itu ada juga upaya perlindungan sosial (Mahnaz Hassan, 2015).

Hubungan Kemiskinan dengan kesejahteraan

Kemiskinan merupakan masalah dihadapi setiap negara di dunia. Kemiskinan sering dikaitkan dengan kesejahteraan. Yang menjadi ukuran kesejahteraan adalah Indeks Pembangunan Manusia(IPM). Teori pertumbuhan baru menekankan pada gerak pemerintah dalam meningkatkan IPM. IPM dapat dilihat dari segi pendidikan, kesehatan dan pengeluaran per kapitanya. Semakin tinggi pendidikan, tingkat kesehatannya baik dan pengeluaran per kapitanya tinggi itu artinya tingkat kesejahteraan masyarakat sudah baik (Dewi dkk., 2017)

Menurut Dewi dkk. (2017) kemiskinan biasanya dapat menghambat pendidikan, kesehatan dan pengeluaran per kapita. Hal itu karena masyarakat miskin memiliki keterbatasan modal sehingga produktivitas yang dimilikinya rendah sehingga pendapatan yang diterima rendah. Rendahnya pendapatan menyebabkan masyarakat miskin kesulitan untuk memperoleh pendidikan formal, walaupun terdapat bantuan pemerintah dalam bidang pendidikan tetapi masyarakat miskin masih perlu mengeluarkan biaya uang saku dan seragam sekolah. Pengeluaran itulah yang membuat masyarakat miskin cenderung memiliki pendidikan yang rendah. Selain itu tingkat kesehatan yang dimiliki juga rendah dikarenakan ketidakmampuan masyarakat miskin untuk memeriksakan kesehatannya. Pendapatan yang sedikit juga menekan pengeluaran per kapita masyarakat miskin. Semua hal itu lah yang mendasari bahwa kemiskinan dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Kaitan kemiskinan dengan kesejahteraan

dapat dilihat dari hasil penelitian dari Adelfina dan Made Jember (2016) yaitu kemiskinan memberi pengaruh yang negatif terhadap IPM. Hasil yang sama juga diperoleh Dewi dkk. dalam penelitiannya yaitu kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Itu berarti apabila tingkat kemiskinan rendah IPM cenderung tinggi yang artinya kesejahteraan masyarakatnya baik dan sebaliknya apabila kemiskinan tinggi IPM cenderung rendah, itu artinya kesejahteraan masyarakatnya tidak baik.

Bantuan Sosial

Pemberian bantuan sosial di Kabupaten Badung ini diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial. Peraturan itu merupakan Peraturan Bupati Badung No.64 Tahun 2011 yang sudah berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. Sebagian pemerintah telah memperluas program bantuan sosial yang sudah ditargetkan sebelumnya (Sarah dan Pincus, 2014). Di Kabupaten Badung bantuan sosial bisa dalam bentuk pemberdayaan masyarakat miskin seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan juga bisa dalam bentuk peningkatan kualitas rumah sehat.

Di Kabupaten Badung bantuan KUBE diberikan kepada masyarakat miskin yang termasuk dalam anggota KUBE. Jumlah anggota KUBE harus 10 orang, dimana dalam satu KUBE ada ketua, sekretaris, bendahara dan sisanya menjadi anggota. Prosedur untuk mendapat bantuan ini yaitu setiap KUBE harus mengajukan proposal, dimana di dalam proposal itu berisikan

- 1) Surat permohonan bantuan KUBE
- 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB)

- 3) Susunan pengurus kelompok
- 4) Struktur organisasi kelompok
- 5) Surat pengukuhan kelompok
- 6) Surat keterangan miskin
- 7) Foto copy KTP

Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran pencapaian target oleh individu atau sekelompok orang. Pendekatan dalam pengukuran efektivitas menurut Lubis dan Husseini (dalam Febri, 2017) yaitu ada tiga pendekatan:

- 1) Pendekatan sumber

Pendekatan sumber dikaitkan dengan mengukur efektivitas dari segi input. Pendekatan sumber lebih mengutamakan ketepatan atau keberhasilan dari suatu kegiatan yang dilakukan.

- 2) Pendekatan proses

Pendekatan proses digunakan untuk melihat sejauhmana kegiatan tersebut sudah dilakukan. Biasanya pendekatan proses dilakukan dengan cara pemantauan suatu kegiatan yang sedang berlangsung.

- 3) Pendekatan sasaran

Pendekatan ini lebih mengukur efektivitas melalui output. Pendekatan sasaran lebih menekankan pada hasil yang dicapai dari suatu kegiatan. Keberhasilan suatu kegiatan biasanya ditentukan oleh input dari suatu kegiatan.

Tabel 4 Standar Ukuran Efektivitas

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40-59,99	Tidak Efektif
60-79,99	Cukup efektif
Diatas 80	Sangat efektif

Sumber : Litbang Depdagri, 1991 (dalam Kartika dan Wiyati, 2015)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk komparatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Badung khususnya di Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Mengwi. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *proportionate stratified random sampling*. Observasi dan wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik di Kabupaten Badung dan Provinsi Bali serta Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat yang menerima bantuan KUBE. Penelitian ini memfokuskan kepada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung.

Efektivitas

Efektivitas bantuan sosial di Kabupaten Badung, dapat dihitung dengan memakai metode statistik sederhana. Rumus perhitungan tingkat efektivitas sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

Realisasi :pencapaian pelaksanaan pemberian bantuan sosial.

Target :batas ketentuan masyarakat yang mendapat bantuan sosial.

Variabel-variabel yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas bantuan sosial adalah variabel input, proses dan output yang terdiri dari:

1. Variabel Input yaitu ketepatan sasaran dan ketepatan penggunaan bantuan sosial.
2. Variabel proses yaitu sosialisasi dan monitoring evaluasi.
3. Variabel output yaitu pendapatan.

Uji Beda

Analisis yang digunakan untuk menganalisis dampak bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah memperoleh bantuan sosial adalah menggunakan uji *wilcoxon*. Untuk menganalisis dampak bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat penerima KUBE di Kabupaten Badung dilakukan pengujian statistik, yaitu uji beda dua rata-rata pengamatan berpasangan dengan tahapan sebagai berikut.

a) Menentukan Hipotesis :

$H_0 : \mu_1 \leq \mu_2$, artinya Bantuan sosial tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat penerima KUBE di Kabupaten Badung.

$H_1 : \mu_1 > \mu_2$, artinya Bantuan sosial berdampak positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat penerima KUBE di Kabupaten Badung.

b) Menghitung nilai statistik (uji beda dengan metode wilcoxon sampel besar) dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Suyana Utama, 2014:25).

$$z = \frac{T - \mu_1}{\sigma_1} \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan :

T = Nilai negatif rank variabel ke-i

μ_1 = Rata-rata sampel ke-i

σ_1 = Simpangan baku sampel ke-i

Rata-rata sampel dan simpangan baku sampel yang dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\mu_1 = \frac{n(n+1)}{4} \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan :

μ_1 = Rata-rata sampel ke-i

n = Banyaknya pasangan data ke-i

$$\sigma_1 = \frac{\sqrt{n(n+1)(2n+1)}}{24} \dots\dots\dots (5)$$

Keterangan :

σ_1 = Simpangan baku sampel ke-i

n = Banyaknya pasangan data ke-i

Tabel z yang digunakan adalah uji satu sisi, dengan tingkat kepercayaan 95 % atau tingkat kesalahan (α) = 5 %.

c) Simpulan

H_0 diterima jika z hitung $\leq z$ tabel dan jika z hitung $> z$ tabel berarti H_0 ditolak atau H_1 diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Bantuan Sosial Bagi Kesejahteraan Masyarakat Penerima KUBE Di Kabupaten Badung.

Variabel yang menentukan efektivitas dari bantuan sosial dalam penelitian ini adalah ketepatan sasaran dan ketepatan penggunaan bantuan. sosial yang merupakan variabel input. Variabel proses untuk menentukan efektivitas bantuan sosial adalah sosialisasi dan monitoring evaluasi dan variabel outputnya adalah pendapatan

1. Ketepatan Sasaran

Sasaran dari bantuan sosial dalam bentuk bantuan KUBE ini adalah masyarakat Kabupaten Badung yang merupakan masyarakat miskin. Ketepatan sasaran digunakan untuk melihat sejauhmana pemberian bantuan sudah sesuai dengan sasaran yang ditentukan sebelumnya.

Tabel 5 Ketepatan Sasaran Pemberian Bantuan KUBE Di Kabupaten Badung

Ketepatan Sasaran	Kecamatan			Jumlah	Persen (%)
	Petang	Abiansemal	Mengwi		
Tepat sasaran	24	20	17	61	82,4
Tidak tepat sasaran	4	3	6	13	17,6
Total	28	23	23	74	100

Sumber : Data Primer, 2018

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan KUBE adalah sebesar 82,4 persen dari total masyarakat Kabupaten Badung yang bertempat tinggal di Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal dan

Kecamatan Mengwi yang mendapatkan bantuan KUBE. Sisanya 17,6 persen tidak tepat sasaran. Ketidaktepat sasaran dilihat dari sisi pendapatan per bulannya yang hampir mendekati dan juga melebihi UMR Kabupaten Badung. Masih adanya ketidaktepatan sasaran ini berarti pemantauan atau seleksi yang dilakukan Dinas mengenai kriteria layak atau tidak layak menerima bantuan KUBE masih kurang. Hal ini terlihat dari penelitian Mat Saleh (dalam Anwar, 2016) yaitu penentuan anggota KUBE belum sesuai dengan teknis sehingga masih ada penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.

2. Ketepatan Penggunaan Bantuan Sosial

Ketepatan penggunaan bantuan KUBE adalah untuk melihat seberapa jauh masyarakat yang mendapat bantuan KUBE sudah menggunakan bantuan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Pemanfaatan bantuan KUBE di Kabupaten Badung di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Mengwi sudah sesuai dengan tujuan yang sudah disepakati sebelumnya. Persentase ketepatan penggunaan bantuan adalah sebesar 100 persen atau sebanyak 74 orang masyarakat sudah menggunakan bantuan KUBE ini dengan baik.

Tabel 6 Ketepatan Penggunaan Bantuan KUBE

Ketepatan Penggunaan Bantuan	Kecamatan			Jumlah	Persen (%)
	Petang	Abiansemal	Mengwi		
Tepat	28	23	23	74	100
Tidak Tepat	-	-	-	-	-
Total	28	23	23	74	100

Sumber : Data Primer, 2018

3. Sosialisasi

Dari Tabel 7 diketahui bahwa 97,3 persen atau sebanyak 72 orang masyarakat yang menerima bantuan KUBE pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Sosial mengenai tujuan dari KUBE dan semua yang berkaitan dengan KUBE. Sosialisasi dilakukan di Kantor Lurah setempat. Sedangkan sebanyak 2,7 persen atau 2 orang menyatakan tidak pernah ada sosialisasi mengenai KUBE.

Tabel 7 Jawaban Masyarakat Yang Menerima Bantuan KUBE Mengenai Ada Tidaknya Sosialisasi

Sosialisasi	Kecamatan			Jumlah	Persen (%)
	Petang	Abiansemal	Mengwi		
Ada	26	23	23	72	97,3
Tidak Ada	2	-	-	2	2,7
Total	28	23	23	74	100

Sumber : Data Primer, 2018

4. Monitoring Evaluasi

Monitoring evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan dari suatu kegiatan yang dilakukan. Monitoring evaluasi biasanya dilakukan oleh dinas terkait yang menyelenggarakan suatu kegiatan. Dari tabel 8 diketahui bahwa 74 orang masyarakat menyatakan adanya monitoring evaluasi mengenai KUBE. Sebanyak 10 orang mengatakan monitoring dilakukan setiap 2 bulan sekali. Sebanyak 13 orang mengatakan 3 bulan sekali dan 51 orang mengatakan monitoring evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial setiap 6 bulan sekali.

Tabel 8 Jawaban Masyarakat Mengenai Adanya Monitoring Evaluasi dalam Bantuan KUBE

Monitoring Evaluasi (Monev)	Kecamatan			Jml.	%	Jumlah monev		
	Petang	Abiansemal	Mengwi			2bln	3bln	6bln
Ada	28	23	23	74	100	10	13	51
Tidak ada	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	28	23	23	74	100		74	

Sumber : Data Primer, 2018

5. Pendapatan

Jawaban masyarakat yang mendapat bantuan KUBE mengenai peningkatan pendapatan pada Tabel 9 yaitu semua masyarakat yang menjadi sampel menyatakan tidak adanya peningkatan pendapatan per individu. Itu dikarenakan masih banyak KUBE yang belum mendapatkan keuntungan seperti halnya KUBE yang mendapat bantuan sapi. Pemberdayaan sapi membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil, semua itu karena bantuan yang diberikan dalam bentuk bibit sapi kecil. Selain itu, masyarakat yang mendapat bantuan bibit babi juga menyatakan tidak ada peningkatan pendapatan per individu. Hal itu karena keuntungan yang didapat setelah menjual babi hanya mendapatkan Rp.2.000.000 sampai Rp.4.000.000 per enam bulan dan keuntungan itu dibelikan bibit babi lagi untuk diberdayakan dan babi yang akan disembelih. Babi yang akan disembelih nantinya akan dibagikan ke semua anggota kelompok setiap 6 bulannya pada saat hari raya penampahan galungan. Daging babi yang didapat kisaran harga Rp.150.000 – Rp.300.000 per anggota kelompok. Sisa uang dari keuntungan itu harus ditabung ke kas kelompok KUBE dan disisakan sedikit untuk membeli pakan babi.

Tabel 9 Peningkatan Pendapatan Penerima Bantuan KUBE

Peningkatan Pendapatan	Kecamatan			Jumlah	Persen (%)
	Petang	Abiansemal	Mengwi		
Meningkat	-	-	-	-	-
Tidak Meningkatkan	28	23	23	74	100
Total	28	23	23	74	100

Sumber : Data Primer, 2018

Ini diperkuat dengan penelitian dari Qodrat (2017) yaitu pemberdayaan ternak memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merasakan

keuntungannya sehingga dalam waktu yang singkat tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perhitungan Efektivitas Bantuan Sosial dalam bentuk bantuan KUBE di Kabupaten Badung

Pada Tabel 10 dapat dilihat keseluruhan variabel yang digunakan untuk menghitung efektivitas seperti ketepatan sasaran, kepatan penggunaan bantuan, sosialisasi, monitoring evaluasi, dan pendapatan.

Tabel 10 Perhitungan Efektivitas bantuan KUBE di Kabupaten Badung

No	Variabel	Target	Realisasi	Persen (%)	Efektivitas Bantuan
1	Ketepatan Sasaran	74	61	82,4	Sangat Efektif
2	Ketepatan Penggunaan Bantuan	74	74	100	Sangat Efektif
3	Sosialisasi	74	72	97,3	Sangat Efektif
4	Monitoring Evaluasi	74	74	100	Sangat Efektif
5	Pendapatan	74	-	-	Sangat Tidak Efektif
Total		370	281	-	
Rata-Rata				75,95	Cukup Efektif

Sumber : Data Primer, 2018

Dari Tabel 10 menunjukkan efektivitas bantuan sosial dalam bentuk bantuan KUBE yang dilihat pada setiap variabel. Variabel ketepatan sasaran hasilnya dapat dikategorikan sangat efektif karena 61 orang dari 74 orang sampel atau sebesar 82,4 persen sudah sesuai sasaran yaitu merupakan masyarakat miskin. Walaupun masih ada beberapa yang tidak tepat sasaran yang dikarenakan pada proses seleksinya masih kurang pemantauan. Hal ini diperkuat dengan penelitian Haryati (dalam Anwar, 2016) yang menyatakan bahwa seleksi peserta penerima KUBE dan pendamping belum tepat sehingga menyebabkan ketidaktepatan sasaran. Variabel ketepatan penggunaan bantuan juga dapat dikategorikan sangat efektif karena semua sampel atau 100 persen sampel sudah

menggunakan bantuan sesuai dengan tujuan awalnya. Begitu juga dengan sosialisasi dikatakan sangat efektif karena hampir semua sampel sudah mendapatkan sosialisasi dari Dinas sosial mengenai bantuan KUBE ini. Sosialisasi sangatlah penting dilakukan karena merupakan salahsatu faktorpenunjang keberhasilan KUBE, hal ini dinyatakan dalam penelitian Joyakin dkk. (2006)Monitoring evaluasi juga dikatakan sangat efektif karena sudah dilakukan pemantauan dari Dinas Sosial mengenai perkembangan dari masing-masing kelompok KUBE. Tetapi menurut Qodrat dalam penelitiannya tahun 2017 salah satu upaya yang dilakukan pendamping yaitu melalui monitoring evaluasi yang melihat sejauhmana perkembangan dari KUBE. Variabel output yaitu pendapatan mendapatkan hasil yang sangat tidak efektif karena semua masyarakat yang menjadi sampel mengatakan tidak adanya peningkatan pendapatan perorangan yang didapat dari KUBE. Hal ini diperkuat dengan penelitian Endang Iriyanti (dalam Anwar, 2016) yaitu hasil dari bantuan KUBE belum dapat dirasakan oleh anggota KUBE karena tidak ada peningkatan pendapatan. Secara keseluruhan rata-rata efektivitas bantuan KUBE mencapai 75,95 persen yang artinya efektivitas bantuan KUBE adalah cukup efektif.

Hasil uji beda kesejahteraan masyarakat penerima KUBE di Kabupaten Badung

Untuk mengukur kesejahteraan digunakan satuan yaitu IPM. Menurut BPS IPM dihitung dengan rumus:

$$IPM = 1/3 \times (\text{Indeks kesehatan} + \text{Indeks pendidikan} + \text{Indeks hidup Layak}) \dots(6)$$

$$\text{Indeks kesehatan} \text{ dihitung dengan rumus} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}} \dots(7)$$

$$\text{Indeks pendidikan dihitung dengan rumus} = \frac{\text{Indeks HLS} - \text{Indeks RLS}}{2} \quad \dots\dots(8)$$

$$\text{Dimana, Indeks HLS dihitung dengan rumus} = \frac{\text{HLS} - \text{HLS}_{\min}}{\text{HLS}_{\max} - \text{HLS}_{\min}} \quad \dots\dots(9)$$

$$\text{Indeks RLS dihitung dengan rumus} = \frac{\text{RLS} - \text{RLS}_{\min}}{\text{RLS}_{\max} - \text{RLS}_{\min}} \quad \dots\dots(10)$$

Indeks hidup layak dihitung dengan rumus :

$$= \frac{\ln(\text{Pengeluaran maks}) - \ln(\text{Pengeluaran min})}{\ln(\text{Pengeluaran maks}) - \ln(\text{Pengeluaran min})} \quad \dots\dots(11)$$

Keterangan :

AHH : Angka Harapan Hidup

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

Untuk menghitung IPM dibutuhkan nilai minimum dan nilai maksimum:

- AHH min : 20 tahun
- AHH maks : 85 tahun
- HLS min : 0 tahun
- HLS maks : 18 tahun
- RLS min : 0 tahun
- RLS maks : 15 tahun
- Pengeluaran min : Rp. 1.007.436
- Pengeluaran maks : Rp. 26.572.352

Tabel 11 Hasil Uji Wilcoxon

Test Statistics ^b	
	IPMsesudah - IPMsebelum
Z	-7.481 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Pengujian terhadap dampak bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat penerima KUBE di Kabupaten Badung yang di uji dengan uji wilcoxon mendapatkan hasil sebagai berikut :

a) Menentukan Hipotesis :

$H_0 : \mu_1 \leq \mu_2$, artinya Bantuan sosial tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat penerima KUBE di Kabupaten Badung.

$H_1 : \mu_1 > \mu_2$, artinya Bantuan sosial berdampak positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat penerima KUBE di Kabupaten Badung.

b) Menghitung nilai statistik (uji beda dengan metode wilcoxon sampel besar) dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Suyana Utama, 2014:25).

$$z = \frac{T - \mu_1}{\sigma_1}$$

Rata-rata sampel dan simpangan baku sampel yang dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\mu_1 = \frac{n(n+1)}{4}$$

$$\mu_1 = \frac{74(74+1)}{4}$$

$$\mu_1 = \frac{74(75)}{4}$$

$$\mu_1 = \frac{5550}{4}$$

$$\sigma_1 = \frac{\sqrt{n(n+1)(2n+1)}}{24}$$

$$\sigma_1 = \frac{\sqrt{74(74+1)(2(74)+1)}}{24}$$

$$\sigma_1 = \frac{\sqrt{74(75)(149)}}{24}$$

$$\sigma_1 = \frac{\sqrt{826950}}{24}$$

$$\mu_1 = 1387,5$$

$$\sigma_1 = \sqrt{34456,25} = 185,62$$

$$\text{Jadi, } z = \frac{T - \mu_1}{\sigma_1} = \frac{0 - 1387,5}{185,62} = -7,5$$

Tabel z yang digunakan adalah uji satu sisi, dengan tingkat kepercayaan 95 % atau tingkat kesalahan (α) = 5 % atau 0,05 dengan $n = 74$. Maka uji satu sisi $z = -1,645$ (didapat dari tabel z).

c) Simpulan

Oleh karena $z_{\text{hitung}} = -7,5 \leq z_{\text{tabel}} = -1,645$, maka H_0 diterima

Berdasarkan hasil Uji Wilcoxon dengan SPSS pada Tabel 11 terlihat bahwa dengan probabilitas sebesar 0,000 dan nilai z yang didapat adalah -7,5 yang lebih kecil dari z tabel yaitu -1,645. Ini berarti H_0 diterima. Jadi disimpulkan bahwa bantuan sosial tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat penerima KUBE di Kabupaten Badung. Ini didukung dengan penelitian dari Endang Iriyanti (dalam Anwar, 2016) yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat belum berubah dengan adanya bantuan pemberdayaan KUBE.

Apabila hasil uji dampak bantuan sosial ini dikaitkan dengan hasil efektivitas bantuan sosial yang hasilnya cukup efektif yang dikarenakan salah satu variabel yang mengukur efektivitas dikategorikan sangat tidak efektif yaitu variabel pendapatan. Ini berarti bantuan sosial dalam bentuk pemberdayaan KUBE belum secara maksimal dapat meningkatkan pendapatan penerima KUBE sehingga belum berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Walaupun kesejahteraan masyarakat penerima KUBE diukur dengan satuan IPM, tetapi karena salah satu dimensi IPM adalah Dimensi Hidup layak yang berkaitan

dengan pengeluaran dimana pengeluaran selalu berkaitan juga dengan pendapatan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang di dapat berdasarkan hasil analisis adalah sebagai berikut.

- 1) Efektivitas bantuan sosial bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung adalah cukup efektif yang dilihat dari variabel input yaitu ketepatan sasaran dan ketepatan penggunaan bantuan, variabel proses yaitu sosialisasi dan monitoring evaluasi dan variabel output yaitu pendapatan.
- 2) Bantuan sosial tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung yang dilihat dari hasil uji wilcoxon yang menunjukkan probabilitas 0,000 dengan z hitungnya yaitu -7,5.

Saran

Dari hasil simpulan yang telah dipaparkan penulis dapat memberikan saran yaitu :

- 1) Sebaiknya pemerintah dan dinas terkait lebih mengkaji lagi pemberian bantuan KUBE agar nantinya mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat miskin.
- 2) Sebaiknya penelitian selanjutnya perlu meneliti efektivitas program-program pengentasan kemiskinan lainnya. Agar diketahui program mana yang memberikan manfaat yang maksimal dan mana yang tidak memberikan manfaat. Sehingga program-program pengentasan kemiskinan tersebut dapat dikaji lagi.

REFERENSI

- Adelfina dan Made Jember. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005 – 2013. *E-jurnal EP Unud*, Vol.5, No.10, ISSN:2303-0178.
- Anwar. 2016. Analisis Efektivitas Kelompok Usaha Bersama Sebagai Instrumen Program Penanganan Fakir Miskin. *Jurnal Sosio Informa*, Vol.2, No.01, Januari-April,2016:53-68.
- Artana Yasa, I Komang Oka; Arka, Sudarsana. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. **Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan**, [S.l.], nov. 2015. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/16494>>. Date accessed: 06 feb. 2018.
- Ashcroft, Vincent and David Cavanaugh. 2008. Survey Of Recent Development. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, Vol. 44, No. 3, ISSN:1472-7234.
- Badan Pusat Statistik. 2014. Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Per Provinsi Periode September 2014. Indonesia.
- Bakhtyar, Zaharim, Sopian and Moghimi. 2013. Housing For Poor People: A Review On Low Cost Housing Process In Malaysia. *Wseas Transactions On Environment and Development*, University Kebangsaan Malaysia, Vol. 9, Issue 2, ISSN:2224-3496.
- BPS Kabupaten Badung. 2016. Data Makro bulan April. Badung.
- BPS Kabupaten Badung. 2017. Badung Dalam Angka 2017. Badung
- BPS. 2014. Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru. Jakarta.
- Ceu Thang and Baharuddin. 2011. Poverty Reduction: A Continuous Social Responsibility In Malaysia. *International Journal Of Rural Studies*, Vol. 18, No. 2, ISSN:1023-2001.
- Dariwardani, Ni Made Inna. Analisis Dinamika Kemiskinan (Poverty Dynamics) Di Bali Berdasarkan Data Susenas Panel 2008 – 2010. **Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan**, [S.l.], may 2014. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/8769>>. Date accessed: 06 feb. 2018

- Dewi, Yusuf dan Rita Yani. 2017. Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *JOM Fekon*, Vol.4, No.1 Februari 2017.
- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Data KUBE. Badung.
- Febri. 2017. Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2km) Di Kota Bandar Lampung. *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Gustafsson, Asghar Zaidi and Eva Franzen. 2007. Financial Poverty. *International Journal Of Social Welfare*, Vol. 16, Issue 1, Pages:67-90, ISSN:1369-6866.
- Hariwan, Peggy; Swaningrum, Ayu. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran Di Jawa Barat. **Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan**, [S.l.], nov. 2015. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/16496>>. Date accessed: 06 feb. 2018.
- Haryanto. 2008. Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu Di Pucanganak Kecamatan Tugu Trenggalek. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9, No. 2, Desember 2008, hal.216 – 227.
- Joyakin, Sugihen, Samet, Susanto dan Sumardjo. 2006. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok (Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). *Jurnal Penyuluhan*. Vol.2, No.2, ISSN:1858-2664.
- Kadji, Yulianto. 2013. Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya. [Http://www.ung.ac.id/formasi/people/196707131998031001](http://www.ung.ac.id/formasi/people/196707131998031001). Diakses Pada 2 Desember 2017.
- Kemenuh dan Wenegama. 2017. Efektivitas Dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) Terhadap Pendapatan Keluarga KK Miskin. *E-Jurnal EP Unud*, Vol.6,No.9,ISSN:2303-0178.
- Khuzaironi. 2015. Pengaruh Kebijakan Apbd Dan Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi* Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kim, Hansung, Sooyen Huh, Sangmi Choi and Yushin Lee. 2018. Perceptions Of Inequality And Attitudes Towards Redistribution In For East Asian Welfare State. *International Journal Of Social Welfare*, Vol. 27, Issue 1, Pages:28-39, ISSN:1369-6866.

- Maccari. 2014. Sustainable Human Development: Human Development Index and The Environment. *International Journal Of Sustainable Human Development*, Vol. 2, Issue 1, Pages:29-34.
- Mahnaz Hassan. 2015. Making an impact? Analysis of Social Protection Programs in Pakistan. *JRP*, Vol.52, No.1 January – June 2015.
- Mendes, Philip. 2009. Retrenching Or Renovating The Australian Welfare State: The Paradox Of The Toward Government's Neo-Liberalism. *International Journal Of Social Welfare*, Vol. 18, Issue 1, Pages:102-110, ISSN:1369-6866.
- Nurwati. 2008. Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol.10, No.1 Januari 2008:1-11.
- Peraturan Bupati Badung Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial.
- Purnami dan Saskara. 2016. Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Jumlah Penduduk Miskin. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan, Universitas Udayana*, Vol.5, No.11:1188-1218, ISSN:2303-0178.
- Putra dan Sri Budhi. 2015. Efektivitas Dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mpd) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, hal.183-196.
- Qodrat. 2017. Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. *Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang*.
- Ranis, Frances Stewart and Emma Samman. 2006. Human Development: Beyond The Human Development Index. *Journal Of Human Development*, Vol. 7, No. 3, ISSN: 1464-9888.
- Rothwell and Jennifer. 2018. The Prevalence and Composition Of Asset Poverty In Canada: 1999, 2005 and 2012. *International Journal Of Social Welfare*, Vol. 27, Issue 1, Pages:17-27, ISSN:1369-6866.
- Sarah, Cook and Pincus. 2014. Poverty, Inequality and Social Protection In Southeast Asia. *Journal Of Southeast Asian Economies*, Vol. 31, No. 1, Pages:1-17, ISSN:2339-5206.

- Shaughnessy. 2014. An Essay on Poverty and child Neglect:New Interventions. *Washington and Lee Journal Of Civil Right and Social Justice*, Vol.21, Issue 1.
- Sri budhi, Made Kembar. Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Bali: Analisis FEM Data Panel. **Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan**, [S.l.], feb. 2013. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/4506>>. Date accessed: 06 feb. 2018.
- Suartha. 2012. Esensi Bantuan Pemerintah Kabupaten Badung Terhadap Keberdayaan Masyarakat. *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Vol.VIII,No.2,ISSN:1907-3275.
- Suhartini, Atik Mar'atis; Yuta, Ropika. Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012. **Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan**, [S.l.], nov. 2015. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/16439>>. Date accessed: 06 feb. 2018.
- Suryadarma dan Sumarto. 2011. Survey of recent developments. *Bulletin of Indonesian Economic studies*, Vol.47, No.2, 2011:155-181.
- Sutikno, Eddy Setiadi, Agnes Tuti rumiati dan Lantip Trisunarno. 2010. Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 11, Nomor 1, halaman : 135-147.
- Suyana Utama. 2014. Aplikasi Analisis Kuantitatif. Denpasar:Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Tomlinson, Robert Walker and Glenn Williams. 2008. Measuring Poverty In Britain As a Multidimensional Concept, 1991-2003. *Journal Of Social Policy*, Vol. 37, Issue 04, Pages:597-620.
- Wirawan. 2015. Efektivitas Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (Uep) Dalam Upaya Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Pendapatan Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Kerambitan. *Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*. Vol: 5 No: 1.
- www.apbd.badungkab.go.id
- Yuki Sekine. 2008. The Rise Of Poverty In Japan: The emergence Of The Working Poor. *Japan Labor Review, Kobe University*, Vol.5, No.4.
- Yusuf dan Sumner. 2015. Growth, Poverty, and Inequality Under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol.51, No.3, ISSN:0007-4918.